Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Diajukan oleh

Karisna Fiandika Adelopa

14919018

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Strata Dua

Di Susun Oleh :

Karisna Fiandika Adelopa

14919018

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun

oleh :

KARISNA FIANDIKA ADELOPA

No. MHS. : 14919018

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.	Kesit Bambang Prakoso, SE., M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PASCASARJANA EKONOMI
YOGYAKARTA

Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir S2 dan solawat serta salam semoga tetap selalu terpanjatkan kepada nabi Muhammad S.A.W sehingga pada kesempatan ini penulis sekaligus peneliti mengambil judul penelitian : "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata dua di Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan Tesis ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
2. Kedua orang tuaku (Syofian, SE., M.Si dan Ir. Ellidya Kartini) yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putranya, terima kasih atas semua pengorbanan Ayah dan Ibu untuk ananda.
3. Bapak Kesit Bambang Prakoso, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dosen penguji tugas akhir yang telah memberikan banyak masukan dalam menyempurnakan penelitian tugas akhir ini yang masih jauh dalam kata sempurna.

4. Seluruh bapak dan ibu dosen Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
5. Teman – teman satu angkatan 09 Magister Akuntansi 2014, yang telah menjadi teman seperjuangan selama kurang lebih dua tahun ini. Sukses selalu untuk kalian semua.
6. Pengurus dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah menyediakan semua materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Yogyakarta, 9 Desember 2016

Karisna Fiandika Adelopa

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTVASI

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل:٤٣)

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; ***maka Bertanyalah Kepada Orang Yang Mempunyai Pengetahuan Jika Kamu Tidak Mengetahui"***
(QS AN-Nahl 43)

"Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda".
(Andrew Carnegie)

Tesis ini penulis persembahkan kepada

yang berperan dalam kesuksesan kehidupan

penulis hingga saat ini terutama kedua orang tua

penulis yang selalu menjadi orang pertama hadir

dalam cerita kehidupan ini, terima kasih ayah (Syofian) dan ibu (Ellidya Kartini)

dan Adik – adik penulis (Dio dan Eky).

Semoga kita semua selalu dalam lindunganNya

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Karisna Fiandika Adelopa menyatakan bahwa Tesis dengan judul : "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi", adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri saya menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



(Karisna Fiandika Adelopa)

NIM : 14919018

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

BERITA ACARA UJIAN TESIS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN dan MOTIVASI ..... **vi**

HALAMAN ORISNALITAS TESIS ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

ABSTRAC ..... **xiii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. RUMUSAN MASALAH 3

1.3. TUJUAN PENELITIAN 4

1.4. MANFAAT PENELITIAN 4

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II : KAJIAN PUSTAKA **6**

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 6

2.1.1 Penelitian Oleh Gunantara Dan Dwiranda 6

2.1.2 Penelitian Oleh Priyono 7

2.1.3 Penelitian Oleh Darwanto dan Yustikasari 7

2.1.4 Penelitian Pendukung Lainnya 8

2.2. LANDASAN TEORI 8

2.2.1. Perencanaan Pembangunan 8

2.2.2.1.Anggaran Daerah Berbasis Kinerja 9

2.2.3. Traditional Theory 11

2.2.4 New Perspective Theory 12

2.2.4. Desentralisasi Fiskal 12

2.2.5. Indikator Desentralisasi 17

2.2.5. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah 18

Pendapatan Asli Daerah 18

Dana Perimbangan 19

2.3. FORMULASI HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21

2.3.1. Hipotesis 21

2.3.2. Kerangka Pemikiran 24

BAB II : METODE PENELITIAN 27

3.1. JENIS PENELITIAN 27

3.2. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 27

3.2.1 Variabel Penelitian 27

3.2.2 Definisi Operasional 27

3.3. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 30

3.4. DATA PENELITIAN 30

3.5. METODE PENGUMPULAN DATA 30

3.6. TEKNIK ANALISA 31

3.6.1 Analisa Deskriptif 31

3.6.2 Analisa Kuantitatif 31

3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik 31

3.6.2.2. Analisa Regresi 33

3.6.2.3. Uji Hipotesis 36

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 38

4.1. DESKRIPSI KEMANDIRIAN DAERAH 38

4.2. UJI ASUMSI KLASIK 42

4.2.1 Uji Heterokedastisitas 42

4.2.2 Uji Normalitas 43

4.2.3 Uji Multikolinearitas 44

4.2.4 Uji Autokorelasi 45

4.3. UJI HIPOTESIS 46

4.3.1 Analisis regresi PAD dan DP terhadap Kemandirian Daerah 46

4.3.2 Analisis regresi Intraksi I 49

4.3.3 Analisis regresi Intraksi II 50

4.3.4 Analisis regresi Intraksi III 51

4.3.5 Analisis regresi Intraksi IV 53

4.4. PEMBAHASAN DESKRIPTIF 54

4.5. PEMBAHASAN HASIL UJI HIPOTESIS 56

4.6 PEMBAHASAN HASIL UJI MRA 56

4.6.1 Pengaruh PAD Dan Interaksi Terhadap Kemandirian Daerah 58

4.6.1 Pengaruh DP Dan Interaksi Terhadap Kemandirian Daerah 58

BAB V : PENUTUP 60

5.1. KESIMPULAN 60

5.2 KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 60

5.2.1. Keterbatasan Penelitian 60

5.2.2. Implikasi Penelitian 61

5.3. SARAN 61

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 SKALA INTERVAL. 18

TABEL 4.1 DDF KOTA YOGYAKARTA 38

TABEL 4.2 DDF KABUPATEN SLEMAN 39

TABEL 4.3. DDF KABUPATEN BANTUL 40

TABEL 4.4. DDF KABUPATEN GUNUNG KIDUL 41

TABEL 4.5. DDF KABUPATEN KULONPROGO 43

TABEL 4.6 UJI HETEROKEDASTISITAS 45

TABEL 4.7 UJI NORMALITAS 45

TABEL 4.8 UJI MULTIKOLINEARITAS 46

TABEL 4.9 UJI AUTOKORELASI 46

TABEL 4.10 KOEFISIEN DETERMINASI 47

TABEL 4.11 UJI F 47

TABEL 4.12 UJI t 48

TABEL 4.13 MRA MODEL 1 49

TABEL 4.14 MRA MODEL 2 51

TABEL 4.15 MRA MODEL 3 52

TABEL 4.16 MRA MODEL 4 53

TABEL 4.17 HASIL UJI HIPOTESIS 55

TABEL 4.18 HASIL UJI MRA 1 & 2 57

TABEL 4.19 HASIL UJI MRA 3 & 4 58

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi.

Disusun Oleh

Karisna Fiandika Adelopa

14919018

Abstract

Perpajakan merupakan instrumen pengumpulan dana yang wajib bagi suatu negara untuk membiayai kegiatan belanja dan investasi yang menunjang dan menjamin kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pada kemandirian daerah diukur dengan dengan derajad desentralisasi fiskal artinya kemandirian suatu daerah dilihat dari keuangan dan fiska. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, dimana data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan RAPBD (Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) se Kabupaten dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, laporan yang dikumpulkan dari tahun 2008-2014. Dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Penelitian menggunakan uji asumsi klasik (*Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi)*, Uji Hipotesis dan dilanjutkan dengan Uji MRA *(Moderated Regression Analysis)*.

Dalam penelitian variabel (PAD) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dan (DP) dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Dengan ditambahnya 2 variabel moderasi di tiap - tiap variabel independen terhadap dependen diketahui bahwa (ABML) alokasi belanja modal langsung tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian daerah, sedangkan (ABMTL) alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah, (ABML) alokasi belanja modal langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah, dan (ABMTL) alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa derajad desentralisasi fiskal (kemandirian daerah) kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di era otonomi daerah secara kumulatif dalam katagori "Kurang", sedangkan untuk kota Yogyakarta secara kumulatif dalam katagori "Sedang".

Keywords ***: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Alokasi Belanja Modal Langsung (ABML), dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung (ABMTL), Moderated Regression Anlysis (MRA)***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan merupakan instrumen pengumpulan dana yang wajib bagi suatu negara untuk membiayai kegiatan belanja dan investasi yang menunjang dan menjamin kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Substantif pajak sebagai sumber dari anggaran negara juga tidak melihat dari kalangan apapun seseorang berasal hanya saja obyek dan subyek tentu harus terpenuhi. Perpajakan di Indonesia masih menjadi sumber kontribusi terbesar dalam susunan anggaran baik didalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber tersebut diharapkan menjadi pembiayaan yang tepat guna dan penyaluran yang berfungsi menjadi mobilitas dalam pembangunan ekonomi pusat dan daerah.

Semenjak era otonomi daerah tiap-tiap pemerintah daerah berwewenang untuk mengalokasikan sumber pendapatan dan mendistribusikan sesuai dengan regulasi di masing-masing daerah. Hal ini membantu pemerintah pusat untuk memetakan kegiatan dana dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan pemisahan tanggung jawab dalam pengelolahan sumber daya yang terdapat dimasing-masing daerah. Dengan berlakunya peraturan yang telah disahkan tersebut pemerintah tidak menutup kemungkinan dalam membantu anggaran ke setiap daerah.

Dewasa ini kebijakan Presiden I.r. Joko Widodo pada masa baktinya memberikan suatu kebijakan alokasi dana desa mencapai 630 juta setiap desa. Hal ini didukung dengan disahkannya legalitas wacana ini telah dikukuhkan di dalam peraturan presiden No. 2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Dalam

aturan yang lebih tinggi terdapat di Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang dengan jelas menyebutkan adanya alokasi dana desa yang dibagikan kepada desa sebagai dana untuk membagun dan memperkuat kapasitas desa. Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan penyerapan pajak pada tiap – tiap daerah semaksimal mungkin hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), apakah merupakan kebijakan yang efektif atau justru penyerapan yang lebih relatif optimal namun mengalokasikannya dengan tepat sasaran sehingga kinerja ditiap daerah menjadi lebih efisien, hal demikian sering yang disampaikan oleh Gubernur D.K.I. Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (30/11/2015).

Program – progam dan kucuran dana dari pemerintah pusat ke daerah dan kebijakan otonomi di tiap daerah menarik untuk diperhatikan karena yang diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi kreatif dan masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan uraian di atas penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati, (2011) yang dilakukan di kabupaten / kota se-jawa dan bali yang menyimpulkan adanya dampak positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, Retrubusi terhadap Belanja Modal daerah namun untuk variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud (Khusaini, 2006). Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi, maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pusat (Priyono, 2011).

Sebelumya penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah terhadap modal belanja daerah banyak dilakukan di masing-masing daerah. Alasan utama penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah perkembangan provinsi DIY terlihat secara fisik dengan jelas di kota Yogyakarta, namun jika untuk kesetaraan perkembangan di tiap kabupaten terlihat adanya kesenjangan yang mengakibatkan masalah sosial yang harus terus diperhatikan, disamping itu Yogyakarta sebagai kota pelajar dimana banyak pendatang yang tinggal di kota dan kabupaten Yogyakarta, hal ini menyebabkan pergesaran simbolis yang di alamatkan pada Yogyakarta menjadi kota metropolitan namun tidak diimbangi dengan infastruktur yang mendukung untuk memudahkan para wisatawan berwisata justru masih mengedapankan transportasi tradisional. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi belanja Modal sebagai Pemoderasi.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian daerah pada pemerintahan kota/kabupaten D.I. Yogyakarta ?
2. Apakah pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian daerah pada pemerintahan kota/kabupaten D.I. Yogyakarta ?
3. Apakah alokasi belanja modal langsung mempengaruhi masing - masing variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian daerah ?

4. Apakah alokasi belanja modal tidak langsung mempengaruhi masing – masing variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian daerah ?
5. Faktor manakah dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemandirian daerah pemerintah kabupaten / kota D.I. Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah khususnya di kota / kabupaten D.I. Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah wawasan dan informasi serta menjadi bahan refrensi bagi pihak lain yang akan melakukan suatu penelitian terkait topik khususnya dalam pengembangan penelitian pajak di daerah.
b. Untuk menjadi informasi tambahan dalam ukuran keuangan kemandirian daerah bagi daerah penelitian dalam meningkatkan perkembangan daerah masing – masing.

1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini merupakan uraian singkat mengenai hal – hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab agar laporan hasil penelitian ini memperoleh gambaran yang beruntun, saling berkaitan, dan jelas. Adapun sistematika penulisan dari laporan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara singkat menjabarkan tentang obyek masalah yang diteliti meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dalam pemecahan masalah yang meliputi : pengertian tentang teori perpajakan daerah, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian secara umum atas lokasi penelitian, instrumen atau alat pengumpul data, data dan teknik pengumpul data, objek penelitian, dan variabel – variabel penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang analisa analisis data yang diperoleh dari penelitian dan memberikan pembahasan dasar konsep teori yang ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisis dan pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu.

Pada bagian ini diuraikan kajian pustaka dan teori yang mendasari peneltian. Beberapa penelitian terdahulu dipaparkan dalam bab ini demi mendasari adanya ide penelitian yang dilakukan.

2.1.1. Penelitian Oleh Gunantara dan Dwiranda, (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta pengaruh moderasi variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Data dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2005-2011.

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil uji moderasi menunjukan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan

daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubasir.

2.1.2. Penelitian Oleh Priyono, (2011).

Penelitian ini mengukur kemandirian suatu daerah dengan variabel bebasnya pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis *Ordinary Least Standard* dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber pada realisasi anggaran pendapatan belanja daerah yang diambil mulai tahun 2007 hingga 2009. Objek penelitian pada pemerintahan kabupaten / kota di Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian daerah di jawa tengah pada tahun 2007 hingga 2009 masih rendah dibawah 20%, sedangkan untuk variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif sedangkan pada variabel retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian daerah jawa tengah, namun untuk variabel bagi hasil memiliki pengaruh negatif dimungkin karena lama tahun masih sangat terbatas begitu juga dengan prosentase kecil pada variabel tersebut.

2.1.3. Penelitian Oleh Darwanto dan Yustikasari, (2007)

Penelitian sebelumnya mengenai pengalokasian belanja modal, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Darwanto dan Yustikasari, 2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Asli Daerah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kab/kota di Jawa-Bali dari tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.1.4. Penelitian Pendukung Lainnya.

Penelitian (Prawira, 2009) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian lain oleh Nur'ainy et al, (2013) mengangkat judul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian dilakukan pada kota - kota yang ada di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah dan berpengaruh positif sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah dan berpengaruh positif.

2.2. Landasan Teori.

2.2.1. Teori Perencanaan dan Pembangunan

Pengertian perencanaan secara konvesional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang

maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan *(planning)* adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara meyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Sejalan dengan yang diutarakan diatas, secara tradisional pemungutan pajak yang nantinya hasil dari pemungutan dalam tahun berjalan untuk menjadi salah satu item utama dalam perumusan perencanaan ditahun yang akan datang. Menjelaskan bahwasanya pemungutan pajak dalam teori ini memliki tujuan ganda yaitu penerimaan dan pengaturan. Selanjutnya (Musgrave,1984) di buku *public finance in theory and pratice* dalam (Priyono, 2011) menyebutkan tujuan kebijakan pemajakan meliputi tiga aspek, yaitu alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsinya pajak dimanfaatkan sebagai intrumen pengumpulan dana untuk pembiayan kegiatan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana kriteria anggaran berdasarkan jenisnya

2.2.1.1. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Halim, 2002 mengatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Halim, 2002), disebutkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, jadi Analisis Beban Kerja dalam pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu pemerintah daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan, kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir merencanakan penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut. Dalam (Mardiasmo, 2002), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Anggaran operasional.

   Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran modal.

   Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

2.2.2. Traditional Theories (First Generatioon Theory)

Pandangan teori tradisional tentang *fiscal federalism* menekankan keuntungan alokasi dari desentralisasi, untuk mendapatkan kemudahan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua ide yang mendasari keuntungan alokasi *Pertama*, Penggunaan "*knowledge in societ*", dimana menurut Hayek, 1945 dalam (Ladjin, 2008), proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mempermudah penggunaan informasi yang efisien. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat. *Kedua*, (Tiebout, 1956) dalam (Ladjin, 2008) mengenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah daerah dan mempunyai pandangan bahwa kompetisi antara pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat. Suatu analogi argumentasi lainnya yang dikenel dengan ungkapan "*Love it or leave it*". Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah daerah dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat daerah, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut (*leave)* atau tetap tinggal di wilayah tersebut (*love*) dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah daerah melalaui perwakilannya di daerah (Hyman, 1993, dalam Khusaini,2006).

2.2.4 New Perspective Theories (Second Generation Theories)

Second generation theories, menjelaskan bagaimana desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Dengan implementasi desentralisasi fiskal apakah pemerintah daerah akan berprilaku berbeda dengan ketika dalam sistem pemerintahan yang sentralistik. Secara teoritik, seharusnya pemerintah daerah akan berprilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat (Hyman, 1993, dalam Khusaini,2006).

2.2.5. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan sebagian sumber penerimaan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan dan pembelanjaan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang

sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka Pendapatan Asli Daerah. Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan Pendapatan Asli Daerah saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam membahas mengenai desentralisasi fiskal, terdapat tiga variabel yang merupakan representasi desentralisasi fiskal (Khusaini, 2006) yaitu :

1. Desentralisasi Pengeluaran

   Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten / kota Anggaran Pendapatn Belanja Daerah terhadap total pengeluaran pemerintah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hasil studi yang dilakukan (Zhang dan Zou, 1998) dalam (Kharisma, 2013) menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Sementara, studi yang dilakukan oleh Philips dan (Woller, 1997) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju.

2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

   Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota Anggarab Pendapatan Belanja Daerah terhadap total pengeluaran pembangunan nasional Anggaran Pendapatan

Belanja Negara. Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Dillinger dalam (Sidik, 2001), pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

a. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
b. Desentralisasi adminitratif yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi–fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.
c. Desentralisasi fiskal (*fiscal dezentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup :

- *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah
- *Cofinancing atau coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
- Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) ,Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).

d. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi pasar.

Menurut (Bahl, 1999) dalam (Priyono, 2011) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power).* Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan

pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatn Belanja Negara dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Menurut (Bird dan Vaillancourt, 2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. *Pertama,* proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kedua* yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi "ekspor pajak" dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Dalam perspektif teori, desentralisasi fiskal akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (*their constituents*), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam

perekonoimian, *public services* dan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh *fiscal federalism theory* (Ross, 2002 dalam Khusaini, 2006).

2.2.6 Indikator Desentralisasi Fiskal

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah. Desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Menurut (Booth, 2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten / kota yang diperoleh dari sumber-sumbber diluar subsidi dari pemerintah pusat. Untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah, sumbangan daerah dengan total pendapatan daerah (Priyono 2011).

Dengan demikian harus diakui bahwa Kemandirian Daerah daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dan perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah.

Tabel 2.1

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%)	Keterangan
0,00 – 10,00%	Sangat kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 -30,00%	Sedang
30,01 -40,00%	Cukup
40,01 – 50,01%	Baik
>50,00 %	Sangat baik

Sumber : Tesis (Priyono, 2011)

2.2.7 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

2.2.7.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.2.7.2 Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil *(by origin)*. Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

1. Dana Bagi Hasil

   Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa dana hasil bagi bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan minyak bumi
- Pertambangan minyak gas bumi
- Pertambangan panas bumi

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU No. 33 Tahun 2004 dibagi di antara daerah propinsi, kabupaten / kota dan pemerintah.

2. Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiskal gap (*fiscal gap*), dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs)* dengan potensi daerah (*fiscal capacity).*

Dengan pengertian lain, Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kemampuan potensi fiskal ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi pendapatan domestik regional bruto (PDRB), industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumber daya lama (diukur dengan PDRB seckor primer) dan sumber daya manusia (diukur dengan tenaga kerja).

3. Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Alokasi Pendapatan Belanja Negara, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai konsekensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis, dan secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

2.3 Formulasi Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

Bagian ini memaparkan asumsi dari keempat variabel penelitian yang di perkuat dengan adanya penelitian terdahulu dan didukung oleh teori yang telah peneliti paparkan sehingga menjadikan satu kerangka dasar penelitian.

2.3.6 Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah (DDF)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari suatu daerah dan dapat dimanfaatkan untuk daerah itu sendiri. Dalam hal kemandirian suatu daerah, daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya lebih baik dan efektif karena semakin tinggi pendapatan asli daerah akan semakin menigkatkan pula persentase kemandirian daerah yang diukur dalam keuangan. Selain itu dalam penelitian (Apriana dan Suryanto, 2010) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian daerah. Hal ini di ungkapkan dalam penelitian (Harianto dan Adi, 2007) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah (DDF)

Dana perimbangan merupakan suntikan dana dari pusat ke daerah yang semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam aktivitas daerah agar mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga daerah kabupaten dan kota semakin mandiri yang ditandai dengan meningkatnya persentase kemandirian daerah dan diikuti dengan penurunan suntikan dana perimbangan ke daerah di setiap tahunnya. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Ardhani, 2010). Pada penelitian (Darwanto, 2007) dalam (Ardhani ,2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja

modal. Sedangkan yang ungkapkan dalam penelitian (Dwiranda dan Gunantara, 2014) menyebutkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tumbuh dan belanja modal selalu terpenuhi maka suatu daerah akan semakin dewasa selanjutnya akan dapat diaharapakan mampu mengembangkan potensi daerah yang akan berkembang. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kemandirian Daerah

Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung masing - masing mempengaruhi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah (DDF)

Mardiasmo (2009) menyatakan secara (substantif) bahwa ada hubungan antara kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu "Dimana peran belanja modal sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi". Belanja modal dan peningkatan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memanfaatkan suntikan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah didapat dari masing – masing daerah sedangkan Dana Perimbangan berasal dari pusat ke daerah (desentralisasi). Pengertian ini didukung dalam penelitian (Kharisma, 2013) yang menyebutkan bahwa hasil analisa sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal, dimana sebelum era desentralisasi fiskal dari tahun 1995 – 2000 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan setelah era desentralisasi fiskal dari tahun 2001 – 2004 mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Dalam penelitian (Zulyanto, 2010) menyebutkan variabel desentralisasi fiskal terbukti positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Berdasarkan uraian diatas maka dapat hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H3a : Alokasi Belanja Modal Langsung Menguatkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

H3b : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung Menguatkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah.

Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung masing - masing mempengaruhi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah (DDF)

Alokasi belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Menurut Wong, 2004 dalam (Suryanto dan Apriana, 2010) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah dan menurunkan suntikan dana pusat ke daerah. Namun, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Abimanyu, 2005). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H4a : Alokasi Belanja Modal Langsung Mnguatkan Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah

H4b : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung Menguatkan Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah.

2.3.7 Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah sedangkan Dana Perimbangan merupakan

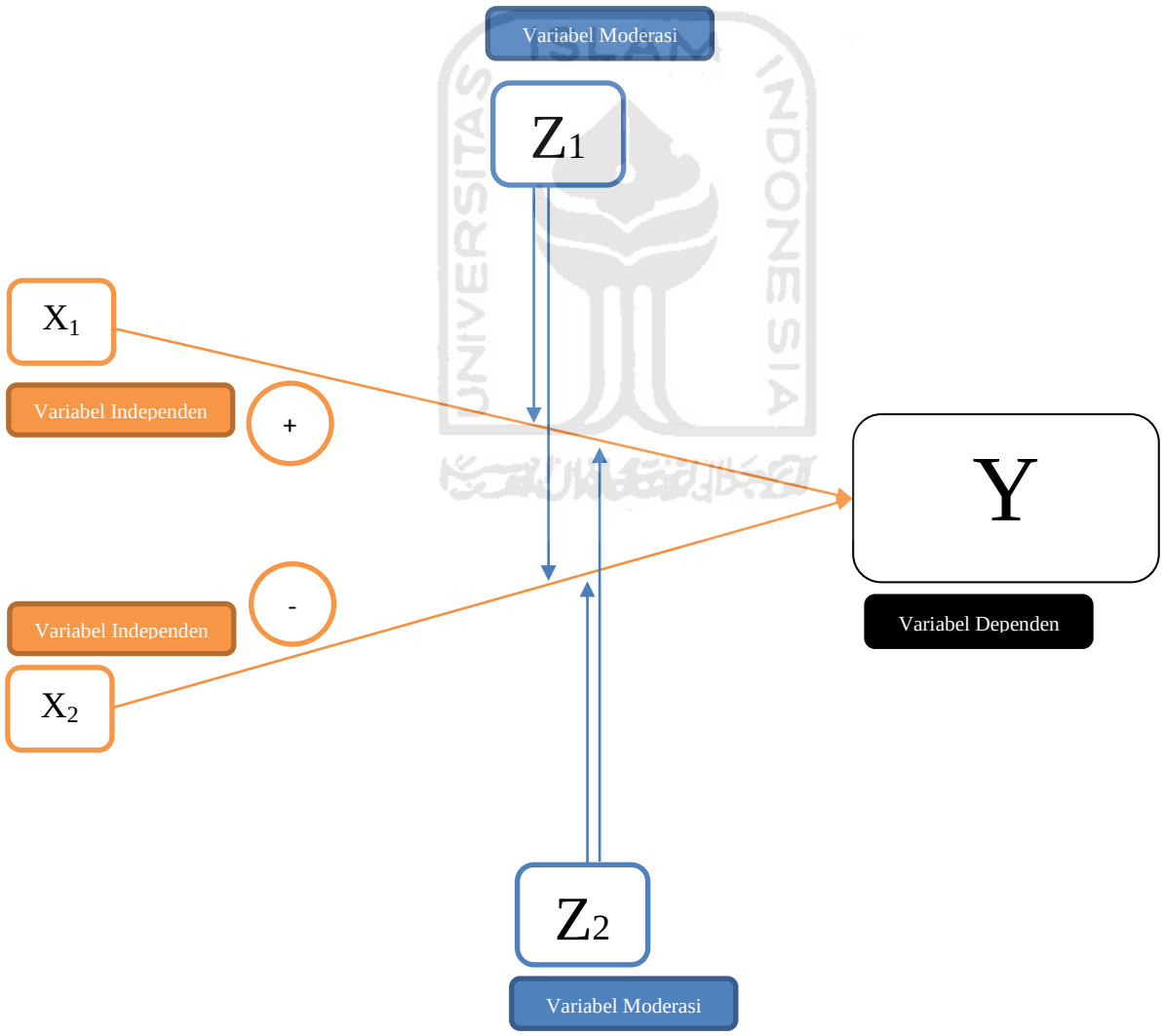
sumbangan dana dari pusat dan daerah, Alasan pengambilan 2 variabel ini adalah karena PAD dan Dana Perimbangan masih menjadi persentase terbesar dalam Anggaran Pendapatam Belanja Daerah. Sedangkan Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi belanja Modal Tidak Langsung merupakan variabel moderasi diharapkan akan menjadi pembeda setelah berinteraksi pada masing – masing variabel independen yang diharapkan dapat menguatkan atau melemahkan hasil dari sebelumnya.

Dalam alur membaca kerangka penelitian ini, pertama variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli daerah (X1) mempengaruhi Kemandirian Daerah (Y), dan Dana Perimbangan (X2) mempengaruhi Kemandirian Daerah (Y). Selanjutnya variabel alokasi belanja modal langsung (Z1) dan variabel alokasi belanja modal tidak langsung (Z2) berperan sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi masing – masing antara variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Kemandirian Daerah). Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) X_1 , Dana Perimbangan X_2, Kemandirian Daerah (Y). di moderasi oleh Alokasi Belanja Modal langsung (Z1) dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung (Z2)



Bab III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kasualitas, namun demikian dalam penelitian ini juga menginginkan pengkayaan dengan statistik deskriptif untuk hal – hal tertentu yang diperlukan. Langkah awal penelitian menggunakan alat bantu analisis statistik deskriptif sebagai dasar awal penelitian. Dengan demikian analisa diawali dengan melihat kecenderungan keterkaitan pada fenomena pengamatan. Selanjutnya pendekataan kuantitatif dengan menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang dilakukan dengan menggunakan analisa statistik.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah sebagai variabel terikat *(dependent variable)*, variabel bebasnya *(independent variable)* adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan dua variabel moderator yaitu Total Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan data runtun waktu dari tahun (2008 – 2014).

3.2.2 Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran, maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang akan digunakan dan definisi operasionalnya. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Derajat desentralisasi atau kemandirian daerah menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kemandirian Daerah ini juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang diproksi dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab/Kota di Provonsi D.I. Yogyakarta yang dinyatakan dalam persen (Priyono, 2011).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembagunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002). Besarnya pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah diukur dengan satuan rupiah. Komponen Pendapatan Asli Daerah ini meliputi :

a. Hasil pajak daerah
b. Hasil restribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

3. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fisikal antara pemerintah, pemerintahan pusat dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri:

a. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umum
c. Dana alokasi khusus

4. Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.

5. Alokasi Belanja Modal Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri atas 1 kota yaitu Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulomprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

3.4 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder *(time series)*, selama periode tahun 2008 s/d 2014. Adapun data yang diperoleh yaitu berupa data realisasi penerimaan daerah, pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ain-lain PAD yang sah, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan kemudian data mengenai alokasi belanja modal.

Sedangkan untuk sumber data berupa kertas laporan tahunan beberapa terbitan seperti statistik keuangan pemerintah D.I. Yogyakarta dalam angka dan jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh di berbagai instasi dan website serta lampiran yang dipublikasi online dalam penelitian ;

1. Pemkot Yogyakarta
2. Pemda Sleman
3. Pemda Bantul
4. Pemda Kulonprogo
5. Pemda Gunungkidul
6. Dan sumber online di publikasi

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan,

literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari pemerintah kota dan pemerintah daerah.

3.6 Teknik Analisa

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008).

3.6.2 Analisis Kuantitatif

Pada analisis kuantitatif ini metode penganalisaan data menggunakan perhitungan statistik dan menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah dapat diterima atau ditolak.

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa *Ordinary Least Squares* (OLS), Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik, sebagai berikut: *normalitas, multikolinearitas, homoskedastisitas dan autokorelasi*. Agar syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka dilakukan uji sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika data tidak berdistribusi normal atau

jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah normal, atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparameterik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikan 5% (p>0,05) (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (nilai korelasi tidak sama dengan nol) (Ghozali, 2011).

Uji multikolinearitas ini dapat dideteksi dengan menilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*Tolerance*). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniaritas adalah nilai *tolerance* $\leq$ 0.10 atau nilai VIF $\geq$10 (Ghozali, 2011).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. *Jika* variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskesdastisitas, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Korelasi Rank Spearman (Sugiyono, 2000). Hipotesis yang diajukan :

H0 : Varians residual data adalah sama (homoskedastisitas).

H1 : Varians residual data adalah tidak sama (heteroskedastisitas), atau

Jika probabilitas (Sig.) > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak (H0 diterima).

Jika probabilitas (Sig.) < 0,05, maka H1 diterima.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai *d* statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin.Watson (DW test) (Ghozali, 2011), dengan keputusan :

d<dl : Terjadi masalah autokorelasi positif

du<d<4-du : Tidak terjadi masalah autokorelasi

1.6.2.2 Analisis Regresi

Dalam penelitian ini perhitungan statistik menggunakan Model Analisis Regresi dengan persamaan sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan:

Y : Kemandirian Daerah

X1 : Pendapatan asli daerah

X2 : Dana perimbangan

a : Konstanta (*Intercept*)

b1, b2, : Koefisien regresi

Untuk menguji adanya pengaruh variabel alokasi belanja modal dalam hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian daerah dengan persamaan regresi melalui uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regresion Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) untuk menggunakan MRA harus membandingkan 2 persamaan regresi (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, model regresi moderasi yang akan di uji akan terbagi menjadi dua persamaan regresi model pertama dapat dirumuskan sebagai berikut :

Model sebelum adanya interaksi :

$Y = a + b1X1 + b2Z1$

$Y = a + b1X1 + b2Z2$

Model setelah adanya Interksi :

$Y = a + b1X1 + b2Z1 + b3X1*Z1$

$Y = a + b1X1 + b2Z2 + b3X1*Z2$

Keterangan:

Y : Kemandirian Daerah

X1 : Pendapatan Asli Daerah

Z1 : Alokasi Belanja Modal Langsung

Z2 : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung

X1*Z1 : Interaksi X1 dan Z1

X1*Z2 : Interaksi X1 dan Z2

a : Konstanta (*Intercept*)

b1, b2,
b3, : Koefisien regresi

Persamaan regresi model kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

Model sebelum adanya interaksi :

Y = a + b1X2 + b2Z1

Y = a + b1X2 + b2Z2

Model setelah adanya Interksi :

Y = a + b1X2 + b2Z1 + b3X2*Z1

Y = a + b1X2 + b2Z2 + b3X2*Z2

Keterangan:

Y : Kemandirian Daerah

X2 : Dana Perimbangan

Z1 : Alokasi Belanja Modal Langsung

Z2 : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung

X2*Z1 : Interaksi X2 dan Z1

X2*Z2 : Interaksi X2 dan Z2

a : Konstanta (*Intercept*)

b1, b2,
b3, : Koefisien regresi

Variabel perkalian antara X1*Z1, dan X2*Z1 pada masing-masing model merupakan variabel moderating yang menggambarkan pengaruh moderating variabel Z terhadap hubungan X1 seterusnya, dan Y. Sedangkan variabel X1, dan X2 merupakan pengaruh langsung terhadap Y. Kriteria penentuan variabel Total Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebagai

variabel moderating dalam hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yakni jika koefisien b2, dan b3signifikan pada level 0,05 atau 0,10.

Pengujian uji interaksi dalam pengujian variabel moderating biasanya menimbulkan masalah yang disebabkan terjadinya multikolinieritas yang tinggi antara variabel independen dan variabel moderating. Misalkan antara variabel pendapatan asli daerah (X1) dan variabel moderating (X1*Z1), hal ini disebabkan pada variabel moderating ada unsur pendapatan asli daerah itu sendiri dan Alokasi belanja modal Langsung (Z1).

1.6.2.3 Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu preposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan / pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

b. Uji F (uji signifikansi simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variebal dependen. Hipotesis alternatif (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. Artinya, semua variebal independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

c. Uji t (uji signifikan parameter individual)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Bab IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota D.I. Yogyakarta

Dalam pembahasan penelitian ini mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Total Penerimaan Daerah yang erat kaitannya dengan Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2008 hingga periode 2014, seperti tabel 4.1. Pada bagian ini akan melihat tingkat persentase di masing – masing kabupaten/kota D.I Yogyakarta di setiap tahun penelitian sehingga akan terlihat kota dan kabupaten mana yang dapat dikatakan mandiri dan pada tahun berapa katagori tersebut dengan melihat ketentuan skala dalam persentase kemandirian fiskal.

Tabel 4.1

Persentase Kemandirian Daerah Berasal dari PAD

Kota Yogyakarta

n	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Keterangan
2008	132.431.571.514.72	720.252.933.347.72	0.18	Kurang
2009	161.473.838.209.95	749.989.016.366.95	0.22	Sedang
2010	179.423.640.057.51	815.495.924.651.51	0.22	Sedang
2011	203.838.217.886.00	951.681.432.622.59	0.21	Sedang
2012	241.190.745.004.00	899.626.131.133.00	0.27	Sedang
2013	383.053.140.140.00	926.528.053.594.00	0.41	Baik
2014	470.641.528.444.00	989.100.906.639.78	0.48	Baik

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian Daerah pada kemandirian di Kota Yogyakarta dari tahun 2008 – 2014, tingkat kemandirian berkisar dari 18% - 48%, mengalami peningkatan di hampir setiap periode, dengan katagori persentase tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2014 dengan 48 % (BAIK) dan persentase rendah pada tahun 2008 dengan 18% (KURANG).

Tabel 4.2

Persentase Kemandirian Daerah Berasal dari PAD

Kabupaten Sleman.

n	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2008	140.631.359.142.43	946.476.028.092.43	0.15	Kurang
2009	157.231.267.811.84	996.182.714.691.84	0.16	Kurang
2010	163.056.459.137.93	1.095.628.887.559.93	0.15	Kurang
2011	203.838.217.886.00	1.316.203.653.131.10	0.15	Kurang
2012	241.190.745.004.00	1.589.142.003.945.90	0.15	Kurang
2013	383.053.140.140.00	1.930.043.531.950.07	0.20	Sedang
2014	470.641.528.444.00	2.170.128.924.146.13	0.22	Sedang

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian Daerah pada kemandirian di Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2014, tingkat kemandirian berkisar dari 15% - 22%, mengalami peningkatan diatas tahun 2012, dengan katagori persentase tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2014 dengan 22% (SEDANG) dan persentase rendah pada tahun 2008,2010,2012 dengan 15% (KURANG).

Tabel 4.3

Persentase Kemandirian Daerah Berasal dari PAD

Kabupaten Bantul

n	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2008	69.800.761.508.85	1.023.590.207.758.85	0.07	Sangat kurang
2009	88.691.362.690.38	882.149.788.429.75	0.10	Kurang
2010	90.238.879.583.48	876.204.469.555.28	0.10	Kurang
2011	128.896.456.173.41	1.165.047.061.158.75	0.11	Kurang
2012	166.597.778.028.00	1.337.570.725.382.56	0.12	Kurang
2013	224.197.864.331.00	1.520.302.695.802.31	0.15	Kurang
2014	357.411.062.723.21	1.813.917.142.695.75	0.20	Sedang

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian Daerah pada kemandirian di Kabupaten Bantul dari tahun 2008 – 2014, tingkat kemandirian berkisar dari 7% - 20%, mengalami peningkatan di hampir setiap periode, dengan katagori persentase tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2014 dengan 20% (SEDANG) dan persentase rendah pada tahun 2008 dengan 7% (SANGAT KURANG).

Tabel 4.4

Persentase Kemandirian Daerah Berasal dari PAD

Kabupaten Gunung Kidul

n	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Keterangan
2008	25.239.545.458.00	650.655.344.555.00	0.04	Sangat Kurang
2009	135.106.762.000.00	703.966.546.430.00	0.19	Kurang
2010	39.756.344.800.80	729.518.588.363.80	0.05	Sangat Kurang
2011	54.462.418.772.00	965.826.232.915.18	0.06	Sangat Kurang
2012	67.050.781.893.09	1.076.501.995.407.09	0.06	Sangat Kurang
2013	124.209.267.500.00	1.242.092.680.000.68	0.10	Kurang
2014	166.720.096.281.22	1.380.262.053.914.34	0.12	Kurang

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian Daerah pada kemandirian di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2008 – 2014, tingkat kemandirian berkisar dari 4% - 19%, mengalami fluktuatif di hampir setiap periode, dengan katagori persentase tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2009 dengan 19% (KURANG) dan persentase rendah pada tahun 2008 dengan 4% (SANGAT KURANG).

Tabel 4.5

Persentase Kemandirian Daerah Berasal dari PAD

Kabupaten Kulonprogo

n	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Keterangan*
2008	42.289.208.577.00	581.934.155.009.44	0.07	Sangat Kurang
2009	39.358.629.412.00	596.428.928.201.19	0.07	Sangat Kurang
2010	48.190.801.571.00	633.088.918.846.16	0.08	Sangat Kurang
2011	53.752.293.432.00	782.558.428.417.45	0.07	Sangat Kurang
2012	74.028.663.155.07	791.826.637.868.63	0.09	Sangat Kurang
2013	95.991.512.851.06	1.003.179.221.523.06	0.10	Kurang
2014	158.623.927.339.19	1.120.424.776.127.66	0.14	Kurang

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian Daerah pada kemandirian di Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2008 – 2014, tingkat kemandirian berkisar dari 7% - 14%, mengalami fluktuatif di hampir setiap periode, dengan katagori persentase tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2014 dengan 14% (KURANG) dan persentase rendah pada tahun 2008,2009, dan 2011 dengan 7% (SANGAT KURANG).

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Heterokesedastisitas

Uji heterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain, dalam hasil uji ini data yang digunakan baik variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi Belanja Modal Tidak

Langsung tidak terjadi Heterokedastisitas yang artinya semua data variabel penelitian bersifat homokedastisitas.

Tabel. 4.6

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Persamaan	n	Variabel	Nilai Sig	Keterangan
MRA_1	Y = a +b1x1 + b2z1+ b3x1*z1	35	X1	0,945	Homokedastisitas
			Z1	0,220	Homokedastisitas
			X1*Z1	0,576	Homokedastisitas
MRA_2	Y = a +b1x1 + b2z2+ b3x1*z2	35	X1	0,974	Homokedastisitas
			Z2	0,864	Homokedastisitas
			X1*Z2	0,077	Homokedastisitas
MRA_3	Y = a +b1x2 + b2z1+ b3x2*z1	35	X2	0,439	Homokedastisitas
			Z1	0,616	Homokedastisitas
			X2*Z1	0,352	Homokedastisitas
MRA_4	Y = a +b1x2 + b2z2+ b3x2*z2	35	X2	0,763	Homokedastisitas
			Z2	0,102	Homokedastisitas
			X2*Z2	0,226	Homokedastisitas

Alat Uji yang digunakan dapat dilakukan dengan korelasi Rank Spearman, dengan Dasar Pengambilan Keputusan :

- Ho : tidak terjadi heterokesdastisitas
- Nilai sig > 0,05, Ho diterima
- Nilai sig < 0,05, Ho ditolak

4.2.2. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Tabel. 4.9

Hasil NPar Tests

Persamaan Regresi	Nilai Sig	Keterangan
Y = a +b1x1 + b2z1+ b3x1*z1	0,147	Berdistribusi Normal
Y = a +b1x1 + b2z2+ b3x1*z2	0,477	Berdistribusi Normal
Y = a +b1x2 + b2z1+ b3x2*z1	0,939	Berdistribusi Normal
Y = a +b1x2 + b2z2+ b3x2*z2	0,970	Berdistribusi Normal

a. Analisis Statistik

Analisis statistic dengan menggunakan uji non parametik Kolmpgorov-Smirov (K-S) (Ghozali, 2011). Dasar Pengambilan Keputusan :

- Ho : data berdistribusi normal
- H1 : data tidak berdistribusi normal
- Jika nilai sig > 0,05, maka Ho diterima
- Jika nilai sig < 0,05, maka Ho ditolak

4.2.3. Uji Multikolineritas

Dalam Uji Multikolinearitas penelitian ini dapat diketahui bahwasanya masing – masing variabel tidak terjadi multikolinearitas dan tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal, variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol, dasar pengambilan keputusan :

- Nilai tolerance > 0,1 : tidak terjadi multikolineritas
- Nilai tolerance < 0,1 : terjadi multikolineritas
- VIF < 10 : tidak terjadi multikolineritas
- VIF > 10 : terjadi multikolineritas.

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Persamaan	n	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
MRA_1	Y = a +b1x1 + b2z1+ b3x1*z1	35	X1	0,737	1,356	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			Z1	0,159	6,280	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			X1*Z1	0,180	5,567	Tidak Terjadi Multikolinearitas
MRA_2	Y = a +b1x1 + b2z2+ b3x1*z2	35	X1	0,398	2,511	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			Z2	0,448	2,233	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			X1*Z2	0,792	1,262	Tidak Terjadi Multikolinearitas
MRA_3	Y = a +b1x2 + b2z1+ b3x2*z1	35	X2	0,677	1,476	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			Z1	0,144	6,968	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			X2*Z1	0,123	8,177	Tidak Terjadi Multikolinearitas
MRA_4	Y = a +b1x2 + b2z2+ b3x2*z2	35	X2	0,785	1,273	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			Z2	0,882	1,134	Tidak Terjadi Multikolinearitas
			X2*Z2	0,792	1,262	Tidak Terjadi Multikolinearitas

4.2.4. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi dapat dilihat tabel dibawah ini untuk persamaan masing – masing tidak terdapat korelasi antar data dan dinyatakan lolos dalam uji autokorelasi, dengan menggunakan kriteria “du < d < 4-du“ Tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi

Persamaan	du	d	4-du	dl	4-dl
MRA_1	1,652	1,916	2,348	1,283	2,717
MRA_2	1,652	2,177	2,348	1,283	2,717
MRA_3	1,652	1,864	2,348	1,283	2,717
MRA_4	1,652	2,094	2,348	1,283	2,717

4.3. Uji Hipotesis

Mengingat bahwa dalam model penelitian tidak ditemukan adanya masalah klasik (Heterokedastisitas, Multikolinieritas, Autokorelasi dan Normalitas) maka selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi yang meliputi analisis pengaruh individual, simultan dan selanjutnya di interpretasikan dengan adanya variabel moderasi dengan menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Adapun hasil ouput regresi linier berganda menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

4.3.1. Analisis Regression variabel PAD dan DP terhadap DDF

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

Keterangan :

- Y : Kemandirian Daerah
- X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 : Dana Perimbangan (DP)

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.918	0.843	0.833	0.00775

Dengan data output SPSS adjusted besarnya R^2 adalah 0,833 hal ini berarti 83,3% variasi Kemandirian Daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan). Sedangkan sisanya (100% - 83,3% = 16,7%) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model. Sedangkan *Standart Eror of Estimate (SEE)* sebesar 0,00775, hal ini berarti makin kecil "*SEE"* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.13

Hasil Uji F (Simultan)

Model	df	F	Sig.
Regression	2	85.772	0.000[b]

Dengan data Output SPSS "ANOVA" atau uji F didapat nilai F hitung sebesar 85,772 dengan sig probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Daerah atau dapat dikatakan secara bersama – sama variabel (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Keterangan :

- F hitung > F tabel : Berpengaruh.
- F hitung < F tabel : Tidak Berpengaruh.
- Nilai Sig < 0,05 : Berpengaruh signifikan.

- Nilai Sig > 0,05 : Tidak berpengaruh signifikan.
- F tabel : 3.28
- df (n1) = k-1 dan df (n2) = n-k

Dalam Pengujian uji t pada *Unstandardized beta coefficients* menghasilkan ke dua variabel independen yang dimasukan kedalam model regresi variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dengan dinyatakan masing – masing variabel tersebut nilai sig 0,000 < 0,05 dengan persamaan matematis

$$DDF = 2{,}347 + 0{,}062\ PAD + (0{,}095\ DP).$$

Keterangan

- Nilai sig < 0,05 : Berpengaruh signifikan
- Nilai sig > 0,05 : Tidak berpengaruh signifikan

Tabel 4.14
Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2.347	0.155	15.108	0.000
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	0.062	0.005	13.095	0.000
DP (Dana Perimbangan)	-0.095	0.015	-6.408	0.000

4.3.2. Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya interaksi Alokasi Belanja Modal Langsung (ABML).

Moderated Regression Analysis (MRA) bagian ini akan mencoba melihat ada tidaknya perubahan setelah adanya variabel interaksi yang akan mempengaruhi secara kuat atau lemah varibel dependen dengan juga membandingkan nilai koefisien determinasinya sebelum dan setelah berinteraksi (Ghozali, 2011), dengan persamaan :

$Y = a + b1X1 + b2Z1 + b3X1*Z1$ (1)

Keterangan :

- Y : Kemandirian Daerah
- X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Z1 : Alokasi Belanja Modal Langsung (ABML)
- X1*Z1 : Produk Variabel Moderasi

Tabel 4.15

Hasil Uji Hipotesis dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	B	Nilai t	Nilai sig	*Adjust R Square*	Nilai F	Nilai Sig
Constamt	-0,614					
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	0,90	2,694	0,011			
ABML (Alokasi Belanja Modal Langsung)	0,65	2,141	0,040	35,7%	5,748	0,003
MRA_1 *(Moderated Regression Analysis_1)*	0,00	0,315	0,755			

Dengan uji F didapat nilai F hitung sebesar 5,748 dengan sig probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Daerah atau dapat dikatakan secara bersama – sama variabel

(Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Belanja Modal Langsung dan Variabel Interaksi_1) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Selanjutnya Interaksi X1*Z1 atau MRA_1 bukan variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal Langsung karena diatas nilai sig 0,05", dan melemahkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah dengan dibuktikan nilai signifikan setelah berinteraksi dengan variabel Alokasi Belanja Modal Langsung menjadi 0,755.

4.3.3. Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya interaksi Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung (ABMTL).

Moderated Regression Analysis (MRA) bagian ini akan mencoba melihat ada tidaknya perubahan setelah adanya variabel interaksi yang akan mempengaruhi secara kuat atau lemah varibel dependen dengan juga membandingkan nilai koefisien determinasinya sebelum dan setelah berinteraksi (Ghozali, 2011), dengan persamaan :

$$Y = a + b1X1 + b2Z2 + b3X1*Z2 \quad (2)$$

Keterangan :

- Y : Kemandirian Daerah
- X1 : Pendapatan Asli Daerah
- Z2 : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung
- X1*Z2 : Produk Variabel Moderasi

Tabel 4.16

Hasil Uji Hipotesis dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Beta	Nilai t	Nilai sig	*Adjust R Square*	Nilai F	Nilai Sig
Constant	-3,26					
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	0,12	2,723	0,011			
ABML (Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung)	0,01	1,192	0,242	39,3%	6,701	0,001
MRA_2 *(Moderated Regression Analysis_2)*	0,001	4,263	0,000			

Dengan uji F didapat nilai F hitung sebesar 6,701 dengan sig probabilitas 0,001, Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Daerah atau dapat dikatakan secara bersama – sama variabel (Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung dan Variabel Interaksi_2) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Sesuai dengan hasil diatas, Interaksi X1*Z2 atau MRA_2 merupakan variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung karena dibawah nilai sig 0,05". dan memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah dengan dibuktikan nilai signifikan setelah berinteraksi dengan variabel Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung menjadi 0,000.

4.3.4. Analisis Regression Dana Perimbangan (DP) dengan adanya interaksi Alokasi Belanja Modal Langsung (ABML),

Moderated Regression Analysis (MRA) bagian ini akan mencoba melihat ada tidaknya perubahan setelah adanya variabel interaksi yang akan mempengaruhi secara kuat atau lemah varibel dependen dengan juga membandingkan nilai koefisien determinasinya sebelum dan setelah berinteraksi (Ghozali, 2011), dengan persamaan :

Y = a + b1X2 + b2Z1 + b3X2*Z1 (3)

Keterangan

- Y : Kemandirian daerah
- X2 : Dana Perimbangan
- Z1 : Alokasi Belanja Modal Langsung
- X2*Z1 : Produk Variabel Moderasi

Tabel 4.17

Hasil Uji Hipotesis dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Beta	Nilai t	Nilai sig	*Adjust R Square*	Nilai F	Nilai Sig
Constant	8,48					
DP (Dana Perimbangan)	0,256	4,138	0,000	59,4%	15,098	0,000
ABML (Alokasi Belanja Modal Langsung)	0,103	5,456	0,000			
MRA_3 *(Moderated Regression Analysis_3)*	0,003	6,554	0,000			

Dengan uji F didapat nilai F hitung sebesar 15,098 dengan sig probabilitas 0,000, Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Daerah atau dapat dikatakan secara bersama – sama variabel (Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Modal Langsung dan Variabel Interaksi_3) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Sesuai dengan hasil diatas, Interaksi X2*Z1 atau MRA_3 merupakan variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Modal Langsung karena dibawah nilai sig 0,05 dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap KEmandirian Daerah dengan dibuktikan nilai signifikan setelah berinteraksi dengan variabel Alokasi Belanja Modal Langsung menjadi 0,000.

4.3.5. Analisis Regression Dana Perimbangan (DP) dengan adanya interaksi Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung (ABMTL),

Moderated Regression Analysis (MRA) bagian ini akan mencoba melihat ada tidaknya perubahan setelah adanya variabel interaksi yang akan mempengaruhi secara kuat atau lemah varibel dependen dengan juga membandingkan nilai koefisien determinasinya sebelum dan setelah berinteraksi (Ghozali, 2011), dengan persamaan :

$Y = a + b1X2 + b2Z2 + b3X2*Z2$ (4)

Keterangan

- Y : Kemandirian Daerah
- X2 : Dana Perimbangan
- Z2 : Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung
- X2*Z2 : Produk Variabel Moderasi

Tabel 4.18

Hasil Uji Hipotesis dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Beta	Nilai t	Nilai sig	Adjust R Square	Nilai F	Nilai Sig
Constant	4,874					
DP (Dana Perimbangan)	0,17	2,810	0,009			
ABMTL (Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung)	0,003	0,719	0,478	55,2%	12,751	0,000
MRA_4 *(Moderated Regression Analysis_4)*	0,001	6,078	0,000			

Dengan uji F didapat nilai F hitung sebesar 12,751 dengan sig probabilitas 0,000, Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Daerah atau dapat dikatakan secara bersama – sama variabel (Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung dan Variabel Interaksi_4) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Sesuai dengan hasil diatas, Interaksi X2*Z2 atau *Moderated Regression Analysis_4* (MRA_4) merupakan variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung karena dibawah nilai sig 0,05". dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah dengan dibuktikan nilai signifikan setelah berinteraksi dengan variabel Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung 0,000.

4.4. Pembahasan Deskriptif

Berdasarkan hasil deskriptif yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kemandirian Daerah kabupaten / kota D.I Yogyakarta di era otonomi daerah dari tahun 2008-2014 masih rendah, hanya pada tahun 2013 dan 2014 pada kota Yogyakarta masuk dalam katagori baik dengan prosentase 48%, sedangkan selebihnya masuk dalam katagori sangat kurang, kurang dan sedang. Dalam hal ini hasil penelitian yang di uji mendukung penelitian yang pernah ada oleh (Priyono, 2011), dan (Gunantara dan Dwiranda, 2014) yang menjelaskan kemampuan daerah di tinjau berasal dari Kemandirian Daerah.

4.5. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

- Hasil Uji Hipotesis.

Hipotesis Menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi D.I Yogyakarta di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukan hasil signifikan Pendapatan Asli Daerah dengan nilai t hitung 13.095 dan angka probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian Daerah adalah sebesar 0,062. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan

pendapatan asli daerah akan juga meningkatkan Kemandirian Daerah sebesar persentase 6%.

Tabel 4.19

Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Simbol	Nilat t hitung	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	X1	13,095	0,000	H1 Terbukti
Dana Perimbangan	X2	-6,408	0,000	H2 Terbukti

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan di setiap masing – masing daerah. Sehingga dengan melihat hasil statistik tersebut membuktikan bahwa pendaptan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah dengan semakin meningkatnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah maka dapat dikatakan kemandirian suatu daerah akan menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Gunantara dan Dwiranda, 2014) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terahadap Pertumbuhan Ekonomi, demikian juga dengan penelitian (Priyono, 2011) menyatakan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak secara bersama berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian yang diformulasikan dalam penelitian ini.

Variabel independen kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi D.I Yogyakarta di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukan hasil signifikan Dana Perimbangan dengan nilai hitung -6.408 dan angka probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa Dana Perimbangan signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan nilai koefisien Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah adalah sebesar -0,095. Hal ini menjelaskan bahwa setiap penurunan dana perimbangan akan meningkatkan Kemandirian Daerah sebesar persentase 9%. Sebagaimana diketahui bahwa dana perimbangan merupakan sumbangan Daerah di setiap masing – masing daerah. Sehingga dengan melihat hasil statistik tersebut membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah dengan semakin menurunnya persentase Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah maka dapat dikatakan kemandirian suatu daerah akan menjadi lebih baik.

4.6. Pembahasan Hasil Uji MRA

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan di setiap masing – masing daerah. Sehingga dengan melihat hasil statistik tersebut membuktikan bahwa Pendaptan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah dengan semakin meningkatnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah maka dapat dikatakan kemandirian suatu daerah akan menjadi lebih baik. Hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian yang diformulasikan dalam penelitian ini.

Tabel 4.20

Ringkasan Uji MRA 1 dan MRA 2

Variabel	Model/Simbol	Nilai t hitung	Nilai Signifikansi	Keterangan
MRA_1 Moderated Regresion Analysis_1	X1*Z1	0,315	0,755	H1a tidak terbukti
MRA_2 Moderated Regresion Analysis_2	X1*Z2	4,263	0,000	H1b terbukti

Dengan adanya Alokasi Belanja Modal Langsung dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung diharapkan dapat memperkuat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah. Melihat hasil dari statistik *Moderated Regression Analysis_1* (MRA_1) sebagai variabel interaksi dengan nilai signifikan 0,755 lebih besar dari 0,05 juga memperkuat bahwasanya alokasi belanja modal langsung tidak mampu memoderasi variabel pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah. Hal ini dimungkinkan dalam masa penelitian belum tercapainya secara optimal pendapatan asli daerah namun disisi lain pembekakan dalam belanja langsung daerah.

Sedangkan untuk variabel *Moderated Regression Analysis_2* (MRA_2) sebagai variabel interaksi kedua dengan nilai signifikan lebih besar 0,000 > 0,05, yang berarti variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal Tidak

Langsung adalah merupakan variabel moderator. Dapat disimpulkan bahwa variabel *Moderated Regression Analysis_2* (MRA_2) merupakan variabel yang mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah dan memperkuat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

4.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah

Hipotesis Menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukan hasil signifikan Dana Perimbangan dengan nilai hitung -6.408 dan angka probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa Dana Perimbangan signifikan terhadap kemandirian daerah.

Tabel 4.21

Ringkasan Uji MRA 3 dan MRA 4

Variabel	Model/Simbol	Nilai t hitung	Nilai signifikansi	Keterangan
MRA_3 Moderated Regresion Analysis_3	X2*Z1	6,554	0,000	H2a Terbukti
MRA_4 Moderated Regresion Analysis_4	X2*Z2	6,078	0,000	H2b Terbukti

Dengan adanya alokasi belanja modal langsung dan alokasi belanja modal tidak langsug diharapkan dapat memperkuat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah. Dengan melihat hasil dari statistik *Moderated Regression Analysis_3* (MRA_3) sebagai variabel interaksi dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bahwasanya variabel interaksi antara Dana perimbangan dan Alokasi Belanja Modal Langsung mampu memoderasi variabel Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah dan memperkuat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah.

Sedangkan untuk variabel *Moderated Regression Analysis_4 (*MRA_4) sebagai variabel interaksi keempat dengan nilai signifikan lebih kecil 0,000 < 0,05, yang berarti variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung adalah signifikan karena dibawah nilai signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi *Moderated Regression Analysis_4* (MRA_4) merupakan variabel yang mampu memoderasi variabel Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah dan memperkuat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (kemandirian daerah) kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di era otonomi daerah secara kumulatif dalam katagori "Kurang", sedangkan untuk kota Yogyakarta secara kumulatif dalam katagori "Sedang", sehingga faktor dana perimbangan masih menjadi persentase tertinggi dalam struktur anggaran daerah di kota Yogyakarta khusus nya di kabupaten – kabupaten daerah istimewa yogyakarta. Sedangkan dalam uji hipotesis juga ditunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Selain itu hasil analisis variabel moderasi dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis (*MRA) menunjukan bahwa alokasi belanja modal langsung tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian daerah, sedangkan alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah. Alokasi belanja modal langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah, dan alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah.

5.2. Keterbatasan dan Implikasi Penelitian.

5.2.1. Keterbatasan Penelitian.

Setiap penelitian tidak lepas dari keterbatasan, hal ini juga disadari oleh penulis. Dalam penelitian ini keterbatasan – keterbatasan yang dialami penulis adalah :

1. Semua data tidak disajikan terstruktur dalam bentuk elektronik sehingga waktu pengumpulannya lama yang dapat menyebabkan data yang dibutuhkan kurang lengkap.
2. Ditetapkannya kebijakan bantuan langsung dana desa pada tahun 2015 mengakibatkan data yang dikumpulkan menjadi terbatas.

5.2.2. Implikasi Penelitian.

Berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan, maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Pada pemerintah daerah lebih optimal lagi dalam memanfaatkan potensi daerah masing – masing dengan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pariwisata, dan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat meminimalkan bantuan dana pusat.
2. Program kerja yang tepat sasaran (efektif) dengan memanfaatkan dana yang ada dapat menghasilkan kerja yang efesien, seperti pembangunan infrastruktur untuk memobilisasi aktivitas daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diusulkan beberapa hal guna meningkatkan kemandirian daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih diperhatikan dalam perkembangannya.

3. Diharapkan dilakukan penambahan variabel – variabel predictor atau independen dengan memperhatikan kebijakan – kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yan lebih lengkap berkaitan dengan kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih.*Bappeki Depkeu.

Agus, R. 2013. "Ahok Bakal Potong Anggaran Dinas PU Hingga 40%". *http://www.bisnis.com/m/ahok-bakal-potong-anggaran-dinas-pu-hingga-40.* 17 Juli 2013

Agustina, W. 2009. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap pengalokasian anggaran belanja modal". *Skripsi* ; UniBraw, Malang

Apriana. D dan Suryanto. R, 2010. "Analisis hubungan antara PAD, Kemandirian Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 11 No. 1*, halaman: 68-79, Januari 2010, UMY

Ardhani, P. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Tesis*, 2011 : 2011.

Bastian, I. 2015. *Perencanaan Pembangunan Kecamatan Desa*; Jakart; Erlangga

Bahl, R, 1999. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization Published Of The World Bank*, New York

Bird dan Vaillancourt. 2002 "*Desentralisasi Fiskal di negara – negara berkembang*", cetakan 1 jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Booth, Anne. 2000. Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijaksanaan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan, *Rangkuman Collin Mac Andrews dan Icksul Amal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015 "*Ekonomi dan Perdagangan – Keuangan D.I. Yogyakarta (Kota dan Kabupaten) tahun 2012*". D.I Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.

Darwanto & Yustikasari. 2007 " Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi, Juli. *Skripsi*. Makasar.

Ghozali, I, 2009. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Universitas Diponogoro. Edisi IV.

Gunantara & Dwiranda. 2014 " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi di Bali". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN : 23022-8556. Bali.

Hadi, S. 2009. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi Keuangan*". Yogyakarta; Ekononisia FE. Cetakan II. Maret 2009

Halim, A. 2002. "*Akuntansi Keuangan Daerah*" Jakarta : Salemba Empat.

Halim, A. 2007. "*Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* ; Pengelolahan Keuangan Daerah" Yogyakarta; UPP STIM YKPN.

Harianto, dan Adi. 2007. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita (Kabupaten/Kota se-Jawa Bali)". *Skripsi* ; UniBraw, Malang

http://news.liputan6.com/read/2378620/ahok-lebih-baik-penyerapan-anggaran-rendah-daripada-dicolong

Indonesia Tax Review, 2016. "*Alokasi dana desa sebagai dana untuk membangun dan memperkuat kapasitas desa*". Volume VIII/ Edisi 22.

Jordan, Roy. 2013. "Ditambah SiLPA, APBD DKI 2013 Jadi Rp. 49.9 Triliun". *http://news.detik.com/read/2013/01/11/035011/2139145/10/ditambah-silpa-apbd-dki-2013-jadirp-499-triliun?n991103605*, 11 Januari 2013

Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 14(2) : 101-119*. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.

Khusaini, M. 2006. "Ekonomi Publik; Desentralisai Fiskal dan Pengembangan Daerah. Malang" : BPFE UNIBRAW.

Ladjin, N. 2008 Analisis Kemandirian Daerah di era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah". *Tesis*, September. UNDIP Semarang.

Laksmi, R. 2013 " Pengaruh PAD, DAU, SILPA, Realisasi Anggaran dan Tangga Penetapan PERDA ABPD terhadap Anggaran Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah – DIY Periode 2007 - 2010". *Tesis*, Juli. UII Yogyakarta.

Litbang Depdagri FISIPOL UGM. 1991. *Interprestasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah. Yogyakarta*; Fisipol UGM

Mardiasmo. 2002. "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta; Penerbit Andi Offset.

Mudrajad Kuncoro, 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang.* Erlangga, Jakarta.

Musgrave R.A& Musgrave P.B, 1984. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Nur'ainy, et al. 2013 "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)". ISSN :1858-2559 vol 8 oktober 2013, PESAT, Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Philips, L. and Woller. 1997. *Does fiscal decentralization lead to economic growth?. Department of Economics,* Brimigham Young Univerasity.

Prawira,Y. 2009. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran belanja modal". *Skripsi* ; UniBraw, Malang

Priyono, N. 2011 " Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Jawa Tengah tahun 2007 - 2009". *Tesis,* Desember. UII Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Resmi. 2014. "*Perpajakan Teori dan Kasus*". Jakarta; Salemba empat

Republik Indonesia , (2004-a), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Ridwansyah, M. 2003 "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". *Skripsi,* Desember. UI Jakarta.

Rubenstein, Ross, 2002. *Budgeting and Fiscal Management*. International Training Program, GSU, Atlanta.

Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sasana, Hadi. (2009). Peran Desentralisasi Fiscal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Privinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 10 (1) : 103-124, UI, Jakarta.

Sekaran, U. 2002. "*Research Method for Business; A Skill Building Approuch*" 7th Edition. New York; John Willey and Son

Sianturi, A.2010. "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten / Kota di Sumatera Utara (Tahun 2005-2008)". *Skripsi*; UNILA, Lampung

Sidik, M, 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Batam : Sidang Pleno X ISEI

Sistina, M et al. 2010. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. *Skripsi*, Universitas Jember

Soemarso. 2007. "*Perpajakan Pendekatan Komprehensif*"; Jakarta; Salemba empat.

Sugiyono.2015. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung; Penerbit Alfabeta.

Sulistiyowati, D. 2011 "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*; Undip Semarang.

Undang – Undang No.34 Tahun 2000 tentan Perubahan atas Undang – undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi.

Woller, Gary M. dan Kerk Phillips. 1998. Fiscal Decentralization and LDC Economy Growth: An Empirical Studies. Department Of Economics. Brigham Young Unverisity.

Wong, John D. 2004. "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity", *Journal of Publict Budgeting*, Accounting and Financial Management, p. 413-423.

www.djpk.depkeu.go.id

Zhang, Tao and Heng-fu Zou. (1998). *Fiscal decentralization,public spending and economic growth in China.* World Bank, policy research working paper No. 1608.

Lampiran I

Hasil Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12629392
Most Extreme Differences	Absolute	,193
	Positive	,193
	Negative	-,136
Kolmogorov-Smirnov Z		1,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		,147

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12270822
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		,842
Asymp. Sig. (2-tailed)		,477

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07403060
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,533
Asymp. Sig. (2-tailed)		,939

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07770226
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,071
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,489
Asymp. Sig. (2-tailed)		,970

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 2 **:**

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,335[a]	,112	,026	,17913686

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,126	3	,042	1,305	,290[a]
	Residual	,995	31	,032		
	Total	1,120	34			

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1

b. Dependent Variable: ABS_RES1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,803	1,044		,769	,448
	Ln_X1	,003	,045	,014	,069	,945
	Ln_Z1	-,052	,041	-,531	-1,253	,220
	LnX1*LnZ1	,001	,002	,225	,565	,576

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX1*Ln Z2, Ln_Z2, Ln_X1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,365[a]	,133	,050	,17580948

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X1

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,148	3	,049	1,591	,211[a]
	Residual	,958	31	,031		
	Total	1,106	34			

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X1

b. Dependent Variable: ABS_RES2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,153	1,437		-,107	,916
	Ln_X1	-,002	,060	-,009	-,033	,974
	Ln_Z2	-,002	,012	-,043	-,173	,864
	LnX1*LnZ2	,001	,000	,344	1,832	,077

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX2*Ln Z1, Ln_X2, Ln_Z1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,231[a]	,053	-,038	,04938218

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ1, Ln_X2, Ln_Z1

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,004	3	,001	,581	,632[a]
	Residual	,076	31	,002		
	Total	,080	34			

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ1, Ln_X2, Ln_Z1

b. Dependent Variable: ABS_RES3

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,881	1,112		,792	,434
	Ln_X2	-,031	,039	-,167	-,784	,439
	Ln_Z1	-,006	,012	-,234	-,507	,616
	LnX2*LnZ1	,000	,000	,470	,944	,352

a. Dependent Variable: ABS_RES3

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX2*Ln Z2, Ln_Z2, Ln_X2[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES4

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,372[a]	,138	,055	,04673914

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X2

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,011	3	,004	1,657	,197[a]
	Residual	,068	31	,002		
	Total	,079	34			

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X2

b. Dependent Variable: ABS_RES4

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,191	,943		-,203	,841
	Ln_X2	,011	,035	,057	,305	,763
	Ln_Z2	-,004	,002	-,299	-1,685	,102
	LnX2*LnZ2	8,87E-005	,000	,232	1,237	,226

a. Dependent Variable: ABS_RES4

Lampiran 3 :

Hasil Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,598[a]	,357	,295	,13226	1,916

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,302	3	,101	5,748	,003[a]
	Residual	,542	31	,017		
	Total	,844	34			

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ1, Ln_X1, Ln_Z1

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,614	,771		-,797	,432		
	Ln_X1	,090	,033	,452	2,694	,011	,737	1,356
	Ln_Z1	,065	,030	,772	2,141	,040	,159	6,280
	LnX1*LnZ1	,000	,001	,107	,315	,755	,180	5,567

a. Dependent Variable: Y1 (DF)

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX1*Ln Z2, Ln_Z2, Ln_X1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,627[a]	,393	,335	,12851	2,177

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X1

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,332	3	,111	6,701	,001[a]
	Residual	,512	31	,017		
	Total	,844	34			

a. Predictors: (Constant), LnX1*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X1

b. Dependent Variable: Y1 (DF)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,262	1,050		-3,106	,004		
	Ln_X1	,120	,044	,604	2,723	,011	,398	2,511
	Ln_Z2	,010	,008	,249	1,192	,242	,448	2,233
	LnX1*LnZ2	,001	,000	,670	4,263	,000	,792	1,262

a. Dependent Variable: Y1 (DF)

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX2*Ln Z1, Ln_X2, Ln_Z1[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,771[a]	,594	,554	,07753	1,864

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ1, Ln_X2, Ln_Z1

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,272	3	,091	15,098	,000[a]
	Residual	,186	31	,006		
	Total	,459	34			

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ1, Ln_X2, Ln_Z1

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,483	1,746		4,859	,000		
	Ln_X2	,256	,062	,576	4,138	,000	,677	1,476
	Ln_Z1	,103	,019	1,649	5,456	,000	,144	6,968
	LnX2*LnZ1	,003	,000	2,138	6,554	,000	,123	8,117

a. Dependent Variable: Y2 (DF)

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX2*Ln Z2, Ln_Z2, Ln_X2[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,743[a]	,552	,509	,08138	2,094

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X2

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,253	3	,084	12,751	,000[a]
	Residual	,205	31	,007		
	Total	,459	34			

a. Predictors: (Constant), LnX2*LnZ2, Ln_Z2, Ln_X2

b. Dependent Variable: Y2 (DF)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,874	1,641		2,969	,006		
	Ln_X2	,170	,060	,381	2,810	,009	,785	1,273
	Ln_Z2	,003	,004	,092	,719	,478	,882	1,134
	LnX2*LnZ2	,001	,000	,821	6,078	,000	,792	1,262

a. Dependent Variable: Y2 (DF)

Lampiran 4

Hasil Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DP, PAD[b]	.	Enter

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918[a]	.843	.833	.00775

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	2	.005	85.772	.000[b]
	Residual	.002	32	.000		
	Total	.012	34			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.347	.155		15.108	.000
	PAD	.062	.005	1.065	13.095	.000
	DP	-.095	.015	-.521	-6.408	.000

Lampiran 5

Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah.

1. *Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta*

N	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Asli Daerah
2008	132.431.571.514.72	504.741.154.863.00	720.252.933.347.72
2009	161.473.838.209.95	517.366.876.957.00	749.989.016.366.95
2010	179.423.640.057.51	484.628.282.571.00	815.495.924.651.51
2011	203.838.217.886.00	491.179.715.516.00	951.681.432.622.59
2012	241.190.745.004.00	575.131.711.129.00	899.626.131.133.00
2013	383.053.140.140.00	658.770.839.000.00	926.528.053.594.00
2014	470.641.528.444.00	663.712.266.941.00	989.100.906.639.78

2. *Pendapatan Kabupaten Sleman*

N	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Asli Daerah
2008	140.631.359.142.43	785.937.430.122.00	946.476.028.092.43
2009	157.231.267.811.84	717.703.169.280.00	996.182.714.691.84
2010	163.056.459.137.93	74.019.8028.398.00	1.095.628.887.559.93
2011	203.838.217.886.00	753.889.009.957.00	1.316.203.653.131.10
2012	241.190.745.004.00	946.821.049.150.00	1.589.142.003.945.90
2013	383.053.140.140.00	992.782.430.677.00	1.930.043.531.950.07
2014	470.641.528.444.00	1.034.404.522.916.	2.170.128.924.146.13

Lanjutan

3. Pendapatan Kabupaten Bantul

N	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Asli Daerah
2008	69.800.761.508.85	679.250.090.167.00	1.023.590.207.758.85
2009	88.691.362.690.38	668.448.989.539.37	882.149.788.429.75
2010	90.238.879.583.48	683.081.409.250.00	876.204.469.555.28
2011	128.896.456.173.41	717.123.249.859.00	1.165.047.061.158.75
2012	166.597.778.028.00	885.352.411.354.00	1.337.570.725.382.56
2013	224.197.864.331.00	938.492.077.341.00	1.520.302.695.802.31
2014	357.411.062.723.21	1.036.632.898.871.00	1.813.917.142.695.75

4. Pendapatan Gunungkidul

N	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Asli Daerah
2008	25.239.545.458.00	586.697.618.097.00	650.655.344.555.00
2009	135.106.762.000.00	507.652.774.630.00	703.966.546.430.00
2010	39.756.344.800.80	635.317.518.463.00	729.518.588.363.80
2011	54.462.418.772.00	667.004.718.903.00	965.826.232.915.18
2012	67.050.781.893.09	799.932.048.514.00	1.076.501.995.407.09
2013	124.209.267.500.00	877.414.789.000.00	1.242.092.680.000.68
2014	166.720.096.281.22	923.974.088.292.00	1.380.262.053.914.34

Lanjutan

5. Pendapatan Kabupaten Kulon Progo

N	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Asli Daerah
2008	42.289.208.577.00	478.689.715.957.00	581.934.155.009.44
2009	39.358.629.412.00	495.646.282.933.00	596.428.928.201.19
2010	48.190.801.571.00	485.094.125.372.00	633.088.918.846.16
2011	53.752.293.432.00	522.276.920.247.00	782.558.428.417.45
2012	74.028.663.155.07	612.419.550.384.00	791.826.637.868.63
2013	95.991.512.851.06	681.454.831.975.00	1.003.179.221.523.06
2014	158.623.927.339.19	708.270.656.952.00	1.120.424.776.127.66